

# DARI MORAL KE EKONOMI: MEMAHAMI AKAR DARI BENTUK PENUNDUKAN DAN PENINDASAN

*Agus Wahyudi*<sup>1</sup>

## **Abstrak**

Artikel ini membahas gagasan radikalisasi demokrasi yang penting untuk kita pahami agar dapat ditangkap dimensi “ontologi” dan ciri utamanya. Proses radikalisasi demokrasi menghasilkan karakteristik utama, yaitu demokrasi radikal dan plural. Radikalisasi demokrasi mendapatkan justifikasinya untuk merevitalisasi perjuangan sosialis melawan kapitalisme dan mempromosikan perjuangan “gerakan sosial baru” yang demokratis: gerakan perkotaan, ekologi, anti-otoritarianisme, anti-kelembagaan, feminis, anti-rasis, dan (kelompok) minoritas seksual dan regional. Konsep demokrasi memiliki dua nilai fundamental yang intrinsik, yakni: kebebasan dan persamaan.

Dalam hasil kajian, didiskusikan bagaimana kedua nilai, kebebasan dan persamaan, ketika berhubungan dengan sistem dan struktur politik, dengan merujuk untuk sebagian dari premis-premis dan praxis demokrasi yang sedang berjalan. Caranya, terutama dengan memusatkan perhatian pada dimensi moral dan ekonomi tempat akar-akar dari beragam bentuk penundukan (*subordination*) dan penindasan (*oppression*) tertanam dalam masyarakat kita. Jelas bahwa penundukan dan penindasan adalah antitesa dari semua gagasan tentang kebebasan dan persamaan. Namun demikian, radikalisasi demokrasi tetap mempertahankan prinsip-prinsip etika politik berupa kebebasan dan persamaan dan menuntut prinsip ini dapat diterapkan atau dipraktekkan dengan tepat.

**Kata Kunci :** demokrasi, radikalisasi, kebebasan, persamaan.

## **Abstract**

*The paper discusses the idea of radicalization of democracy. This idea is important to our understanding to grasp the ontological dimension and main characteristic of democracy. Process of radicalization of democracy will lead to its main characteristic, namely: radical and plural democracy. Radicalization of democracy earns its justification as a strategy to revitalize the socialist struggle against capitalism and to promote the struggle of various “new social movement” for democracy, including: urban movement, ecology, anti-authoritarian, anti-institutionalism, feminism, anti-racism and the movement of sexual and regional minorities. The concept of democracy consists of two fundamental intrinsic values, namely: freedom and equality.*

*The paper particularly focuses on these two values, freedom and equality, in relation to political system and structure, with reference partly to premises and praxis of the ongoing democratic practices. This was done mainly by placing the focus on moral and economic dimension, the sites where multiple forms of subordination and oppression in our society are rooted. It is clear that subordination and oppression are the anti-thesis of any ideas about freedom and equality. However, radicalization of democracy maintains the ethics of politic principles in the forms of freedom and equality and further demands that these principle to be applied and operated appropriately.*

**Keywords:** *democracy, radicalization, freedom, equality.*

---

<sup>1</sup> Staf pengajar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;  
Email: awahyudi@ugm.ac.id

## A. Pendahuluan

Gagasan tentang radikalisasi demokrasi telah diajukan oleh sejumlah pemikir sebagai alternatif paling menarik dan penting dalam masyarakat kita dewasa ini (Smith, 1998: 34). Salah satunya karena radikalisasi demokrasi sangat relevan untuk memberikan penjelasan tentang kemungkinan jalan keluar bagi penderitaan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas, yang terpinggirkan dan pada umumnya tidak beruntung (*worse off*) secara politik dan ekonomi. Secara singkat “radikalisasi demokrasi” adalah proses yang melibatkan serangkaian artikulasi dan aksi untuk mencapai praxis demokrasi radikal dan plural. Relevansi teori Mouffe bagi politik dunia ketiga, termasuk Indonesia, seringkali dikaitkan dengan sifatnya yang tidak preskriptif tetapi kritis, terbuka dan anti-otoritarian. Konsepnya dapat dibedakan dari sejarah pemaksaan ideologi dan rencana pembangunan Barat terhadap masyarakat-masyarakat dunia ketiga, dan mengingat pengambilan keputusan yang terpusat dan kadangkala otoritatif dari negara-negara birokrasi di banyak wilayah dunia ketiga itu (Kapoor, 2002: 459-487).

Disebut radikal karena konsepsi ini menolak menerima pluralitas (keragaman nilai dan identitas) sebagai sekedar fakta sosial, melainkan lebih dari itu, yaitu bahwa pluralitas adalah ciri terpenting demokrasi modern, dan disebut plural karena ada perjuangan dan renegotiasi terus-menerus atas identitas sosial. Latar belakang munculnya gagasan radikalisasi demokrasi penting dipahami karena dapat membantu menangkap dimensi “ontologi” dan ciri utamanya. Melalui cara ini, demokrasi radikal dan plural dapat dibedakan dari *praxis* demokrasi “mainstream”: pemeriksaan yang telah kita lakukan, meskipun sangat permukaan, terhadap dua model demokrasi, yaitu demokrasi agregatif dan deliberatif, memberikan kita titik tolak yang membantu membaca perbedaan dan persamaannya dengan demokrasi radikal dan plural.

Demokrasi radikal dan plural adalah karakteristik yang dihasilkan oleh proses radikalisasi demokrasi. Sebagian ahli menunjukkan bahwa radikalisasi demokrasi mendapatkan justifikasinya dari kebutuhan yang tak terhindarkan untuk merevitalisasi perjuangan sosialis melawan kapitalisme dan mempromosikan perjuangan “gerakan sosial baru” (*new social movement*) yang demokratis: gerakan perkotaan, ekologi, anti-otoritarianisme, anti-kelembagaan, feminist, anti-rasis, dan (kelompok) minoritas seksual dan regional (Smith, 1998: 26). Demokrasi radikal dan plural bekerja dengan menyasar “institusi-institusi ekonomi anti-demokrasi, aparat negara dan juga praktek dan struktur sosial, sambil tetap bergandengan tangan dengan elemen-ele-

men demokratis yang terpecah-pecah dalam kehidupan sosial, dan menyambut dengan tangan terbuka bentuk-bentuk keragaman, aktivisme, inovasi dan perbedaan pendapat, dan di atas semuanya juga mencoba memperdalam dan memperluas keunggulan “kebebasan” (*freedom*) dan “persamaan” (*equality*) (Smith, 1998: 34). Dari sudut ini, kebebasan dan persamaan adalah dua nilai fundamental, dan melekat (intrinsik) dalam konsep demokrasi. Semakin sebuah negara menjunjung dan menghargai “kebebasan” maka artinya para individu, dan setiap warga negara semakin “memiliki dirinya sendiri” (*self-ownership*), dan juga akses bagi pemilikan atas objek eksternal (misalnya *economic resources*) semaksimal mungkin. Jika kebebasan setiap orang dapat diartikan sebagai kapasitas untuk pengembangan diri secara wajar tanpa hambatan, maka persamaan juga dapat dipahami sebagai hak yang sama untuk mencapai pengembangan diri (Smith, 1998: 20). Nilai-nilai ini dipromosikan oleh liberalisme, tetapi para ahli teori Post-Marxist seperti Laclau and Mouffe juga mempertahankannya.

Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana kedua nilai, kebebasan dan persamaan, berhubungan dengan sistem dan struktur politik, dengan merujuk untuk sebagian dari premis-premis dan praxis demokrasi yang sedang berjalan. Kita terutama akan memusatkan perhatian pada dimensi moral dan ekonomi tempat akar-akar dari beragam bentuk penundukan (*subordination*) dan penindasan (*oppression*) tertanam dalam masyarakat kita. Jelas bahwa penundukan dan penindasan adalah antitesa dari semua gagasan tentang kebebasan dan persamaan. Semua bentuk penundukan dan penindasan pada dasarnya anti-demokrasi. Menurut Smith (1998), relasi subordinasi dan relasi opresi sama-sama menunjuk pada ketundukan subjek pada kehendak orang lain, bedanya adalah jika pada relasi subordinasi si subjek tidak menyadari bahwa orang yang mensubordinasi dirinya adalah orang yang menghalangi potensi realisasi dirinya secara penuh, pada relasi opresi si subjek mengetahui bahwa relasi subordinasi yang terjadi adalah relasi yang antagonistik karena si subjek percaya bahwa relasi yang terjadi akan menutup kemungkinan perkembangan identitasnya.

Tetapi, seperti yang ditunjukkan dalam paparan ini, jika gagasan demokrasi liberal menggunakan “konsepsi persamaan politik,” melalui kebijakan negara netral, dan “konsepsi persamaan kesempatan” (*equality of opportunity*) untuk mengatasi problem penundukan dan penindasan, demokrasi radikal dan plural menuntut lebih jauh: negara dan semua kelompok masyarakat sipil demokratis disyaratkan menjadi semakin pro-aktif, dan menjalankan peran yang radikal untuk memastikan agar anggota masyarakat yang paling tidak beruntung, pa-

ling miskin, minoritas dan terpinggirkan tidak terus-menerus mengalami subordinasi dan penindasan.

## **B. Problem Identitas dan Tanggapan Demokrasi Liberal**

Dalam masyarakat demokrasi tanggapan dominan terhadap keberadaan kelompok-kelompok yang termarginalkan, minoritas, dan pada umumnya tak beruntung (*worse off*) seringkali mengambil dua bentuk. Di sini penulis memodifikasi pendekatan Olson dalam kasus Politik Ras di Amerika (Olson, 2004: 107). *Pertama*, adalah melalui adopsi atau pemberlakuan idea “persamaan politik formal” (*formal political equality*), dan idea “persamaan kesempatan” (*equality of opportunity*). Pendekatan ini dapat disebut sebagai “politik universalisme.” Pertimbangannya adalah bahwa negara harus “berlaku netral” terhadap berbagai gaya dan pilihan hidup, termasuk konsepsi kebaikan yang dianut warga negaranya dan setiap orang atau warga negara dinilai dari karakter atau keahliannya, bukan dari keanggotaannya dalam identitas atau kelompok tertentu. Maka, tidak dianggap masalah jika negara tidak mengakui keberadaan kelompok atau golongan, termasuk kaum minoritas, yang terpinggirkan dan paling tidak beruntung secara ekonomi dan politik; jadi negara tidak akan membuat kebijakan publik, legislasi, jurisprudensi dan penegakan hukum yang dapat menolong mereka. Sejalan dengan ini, karena pengertian bahwa semua warga negara adalah setara di depan hukum, distingsi atau pembedaan antara urusan publik dan privat diperkenalkan, dengan akibat misalnya kelompok minoritas, seperti agama, ideologi, atau orientasi seksual (misalnya kaum LGBT) boleh ada atau tidak dalam ruang privat, tetapi secara politik tidak pernah dianggap relevan, dan negara tidak akan pernah memperhitungkan keberadaannya. Di Amerika, terutama di kalangan militer, misalnya pernah ada kebijakan yang menyerupai “LGBT-*blind policy*,” berpura-pura tidak pernah mendengar atau melihat,” (*don't ask, don't tell policy*) demi memperlakukan setiap anggota militer secara sama (Keyes, 2011).

Tanggapan kedua, yang mungkin lebih lemah pengaruhnya meskipun tak kalah menarik dan dapat ditemukan prakteknya, adalah disebut sebagai “politik perbedaan” (*the politics of difference*). Tanggapan ini berkembang bukan karena pengakuan atas apa yang sama-sama dimiliki atau disumbangkan oleh setiap orang, tetapi pada apa yang membuat individu unik. Jadi premisnya adalah bahwa setiap orang dihargai sama tetapi juga memiliki identitas yang berbeda. Penerimaan atas perbedaan inilah yang akhirnya melahirkan pengertian bahwa setiap keunikan perlu mendapatkan pengakuan (*recognition*) yang sama. William Connolly menggambarkan model penanganan

pluralisme ini dalam dua kemungkinan bentuk “*arboreal pluralism*” (konsepsi perbedaan yang menyerupai pohon, dengan dahan, rantai dan daun yang bisa berkembang bebas, tetapi bisa membahayakan pohonnya) dan “*rhizomatic pluralism*” (konsepsi perbedaan tanpa pohon dan dahan yang terpusat tapi terdiri dari jaringan akar dan tunas yang menyebar ke seluruh lingkungan) (Olson, 2004: 83; lihat juga William Connolly, 1995). Kritik mengatakan bahwa politik universalisme dan politik perbedaan yang terlihat pada idea-idea seperti multikulturalisme, yang didefinisikan sebagai problem tentang pengakuan (*recognition*) adalah bahwa politik semacam ini dapat melanggengkan subordinasi dan penindasan dengan menganggap misalnya kaum LGBT sebagai immoral.

Tidak seperti multikulturalisme yang terkesan mendefinisikan identitas sosial sebagai identitas kebudayaan dan karena itu identitas juga dipahami sebagai sesuatu yang statis dan tidak berubah, pengertian identitas menurut pandangan kritis ini ditentukan oleh interaksi dengan orang-orang lain, dan tidak terbentuk atau terjadi dalam isolasi (Olson mengutip Taylor, 2004: 83). Di sini, pengakuan (rekognisi) berarti penerimaan atas identitas diri individu yang sadar terhadap identitas diri individu yang sadar lainnya, dan tuntutan akan martabat mendorong pentingnya “politik tentang pengakuan yang setara”. Pada tingkat tertentu, multikulturalisme memiliki daya tarik karena menjanjikan penghargaan atas perbedaan kebudayaan, meskipun penindasan (*oppression*) terhadap kelompok minoritas. Misalnya kaum LGBT seringkali dilakukan atau diperlakukan dengan cara menghancurkan “perbedaan” itu sendiri demi memperkuat kebudayaan dan perbedaan orientasi seks menjadi seragam (heteroseksual). Menurut pandangan ini, teori rekognisi mengandung kelemahan serius karena tidak memiliki analisis kekuasaan (*analysis of power*), sementara identitas selalu dikonstruksi melalui hubungan-hubungan kekuasaan. Karena itu, seperti halnya problem rasisme di negara Barat, problem LGBT di banyak masyarakat dunia, termasuk di Indonesia mungkin dapat dipahami sebagai bukan problem tentang rekognisi semata-mata, tetapi problem tentang kekuasaan. Ada usaha oleh kelompok melalui sistem dan struktur kekuasaan untuk mempertahankan hak-hak istimewanya atas kelompok yang lain. Kita perlu melihat akar akar dari problem serius ini dari sudut demokrasi radikal dan plural.

### **C. Bahaya Memoralkan Politik**

Ibn Rusyd pernah mengatakan “Jika kau ingin menguasai orang bodoh, kau mesti membungkus setiap yang batil dengan kemasannya agama”. Radikalisasi demokrasi tetap mempertahankan prinsip-prinsip

etika politik (*ethico-political principles*) berupa kebebasan dan persamaan dan menuntut prinsip ini dapat diterapkan atau dipraktekkan dengan tepat. Perbedaan antara dua pengertian konflik yang sungguh-sungguh antagonistik dan konflik yang agonistik dalam demokrasi radikal dan plural didasarkan pada bekerjanya prinsip etika-politik oleh para aktor politik di semua level kekuasaan. Tetapi model demokrasi agonistik atau demokrasi radikal dan plural juga merupakan reaksi terhadap model agregatif dan model deliberatif. Bagi Mouffe, model yang ditawarkannya bukan saja dimaksudkan untuk menelanjangi kesalahan asumsi-asumsi rasionalisme dan individualisme yang melandasi gagasan politik liberal, tetapi juga dianggap lebih unggul karena memberi tempat bagi “*passion*”, yaitu dimensi afektif yang dapat dimobilisasi dalam rangka penciptaan identitas-identitas politik. Mouffe meratapi kaburnya ketegangan dan oposisi politik antara kiri dan kanan, dan melihat realitas politik dengan cara yang berbeda dari “*zeitgeist*” paska politik menyusul kegagalan eksperimen komunisme pada akhir abad ke-20. Ia menyatakan,

Apa yang kita saksikan saat ini bukanlah menghilangnya atau lenyapnya “yang politis” (*the political*) dalam dimensi yang bermusuhan (*the adversarial dimension*) tetapi sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi adalah bahwa dewasa ini “yang politis” dijalankan dalam pernyataan moral (*moral register*). Dengan kata lain, yang politis masih terdiri dari perbedaan antara “kita/mereka,” tetapi “kita/mereka” sekarang ini ditentukan dalam pengertian moral, dan bukan didefinisikan dalam kategori-kategori politik. Alih-alih perlawanan antara “kiri dan kanan” kita dihadapkan pada perlawanan antara “benar dan salah” (Mouffe, 2005: 5).

Dampak bagi politik demokratis ketika rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengidentifikasi diri dengan identitas-identitas politik kolektif menurut Mouffe bisa sangat merugikan. Salah satunya karena orang akan selalu cenderung mencari sumber atau alternatif lain untuk identifikasi politik kolektif ketika kesempatan untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok kolektif itu tidak tersedia atau dibungkam. Di sini isu dan tantangannya adalah bagaimana menyediakan identifikasi politik kolektif yang dapat menyediakan tempat dan memberikan ruang bagi perdebatan agonistik.

Menurut konsepsi Mouffe, politik selalu membutuhkan bentuk-bentuk identifikasi kolektif. Karena distingsi “kita” dan “mereka” merupakan dasar utama kehidupan sosial, maka politik demokratik perlu

menyediakan wacana, praktek dan lembaga-lembaga yang memungkinkan distingsi “kita” dan “mereka” ini dapat terbangun secara politik. Bagi Mouffe, walaupun terjadi pelemahan distingsi politik “kiri” dan “kanan,” tetapi distingsi “kita” dan “mereka” tidak dapat dihapuskan dan selalu dibutuhkan. Dalam semua kejadian politik, distingsi “kita” dan “mereka” selalu hidup dan muncul, dan diperkuat atau semakin dimantapkan melalui kosakata moral. Inilah yang disebut sebagai “pemoralan politik” (*moralization of politics*). Ini terjadi, menurut Mouffe, karena perbedaan “kiri” dan “kanan” digantikan oleh kosakata lain yaitu “benar” dan “salah” (menurut ukuran moral). Model politik “adversarial” dapat hidup dan masih terus bertahan atau selalu ada (sejak kegagalan eksperimen politik kiri) sampai jaman kita sekarang, tetapi dengan ciri pembeda yang mencolok: politik dijalankan dalam “registrasi moral,” yaitu menggunakan kosakata “baik” dan “buruk” untuk membedakan antara “kita” yang baik secara moral, dan “mereka” yang jahat secara moral. Pembunuhan massal terhadap bangsa sendiri yang dimotori oleh tentara di bawah Suharto terhadap anggota PKI atau yang dituduh sebagai pendukung PKI dalam sejarah kelam Indonesia tahun 1965 misalnya hanya dapat dijalankan dan bisa berjalan efektif ketika dibungkus dengan politik sebagai “registrasi moral” ini.

Daftar contoh dari praktek politik dengan “registrasi moral” bisa ditunjukkan hampir tanpa batas, dan kita bisa melihat jejaknya dalam laporan-laporan media massa, dan dalam berbagai wilayah atau kasus yang berbeda-beda. Salah satu yang terkenal misalnya dalam konteks global tentang “moralisasi politik” ini adalah ucapan Presiden George W. Bush yang mempertentangkan “kita” yang beradab dengan “mereka” yang barbar dengan pernyataannya yang sangat terkenal ketika mendeklarasikan perang melawan terorisme, “*you are either with us or against us.*” Bagi Mouffe, pernyataan moral ini terjadi karena ketidakmampuan merumuskan problem-problem yang dihadapi masyarakat dengan cara yang politis (*political*), dan ketidakmampuan membayangkan solusi politik terhadap problem-problem masyarakat menyebabkan semakin banyak isu-isu dirumuskan dalam pengertian atau pernyataan moral. Bagi Mouffe, dampak dari kecenderungan ini bagi demokrasi sangat merusak sebab ketika lawan politik tidak didefinisikan secara politis tetapi secara moral, lawan politik itu tidak lagi dapat dilihat sebagai “*adversaries*” (saingan), tetapi sebagai “*enemies*” (musuh) yang harus dihancurkan. Dengan menyematkan label “jahat” pada musuh, diskusi agonistik tidak lagi dapat dijalankan. Pilihannya hanya satu: musuh harus dibinasakan. Bahaya dari politik sebagai registrasi moral dapat dikhawatirkan menimpa kelompok-

kelompok masyarakat paling rentan dan terpinggirkan, termasuk kelompok-kelompok minoritas lain dan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat demokrasi. Kegagalan mengatasi politik sebagai registrasi moral akan menutup kesempatan mengatasi akar-akar penundukan dan penindasan yang masih kuat tertanam dalam sistem dan struktur politik kita.

#### **D. Sosial-Ekonomi, Redistribusi dan Rekognisi**

Meskipun dikembangkan dari teori sayap kiri, demokrasi radikal berbeda dari teori Marxist klasik, terutama dalam hubungannya dengan teori ekonomi dan masalah subordinasi dan penindasan. Tidak seperti Marxist klasik yang menekankan perjuangan kelas sebagai satu-satunya cara mengakhiri semua bentuk subordinasi atau sebagai perjuangan tunggal, satu-satunya yang akan menempatkan semua perjuangan demokratis berada di bawah kepemimpinannya, demokrasi radikal melihat bahwa realitas sosial telah terbagi menurut garis-garis kelas dan juga garis-garis non-kelas, dan kelas sosial mengalami fragmentasi sementara identitas-identitas baru muncul memotong garis-garis kelas sosial. Menurut pandangan Post-Marxist ini, maka keterkaitan antara eksploitasi kapitalis dan bentuk-bentuk penindasan terjalin dengan cara yang sangat kompleks dan saling bertentangan, dan bahwa aspek-aspek imperialisme, sexisme, rasisme, homophobia dan bentuk-bentuk penindasan yang lain akan tetap bertahan bahkan setelah revolusi sosialis terjadi (Smith, 1998: 26).

Pergeseran pandangan yang sangat signifikan dari teori Marxist klasik ke pandangan baru Post-Marxist yang menekankan bahwa formasi kapitalis membentuk dan dibentuk oleh jenis-jenis penindasan berbasis non-kelas memberikan pintu masuk bagi imaginasi yang lebih tajam dan bernuansa. Nampaknya perspektif baru ini juga bermanfaat ketika berhubungan dengan “kekhususan konteks” (*context specificity*), yang pada gilirannya mungkin juga dapat membantu teori-teori yang mencoba memprediksi bagaimana eksploitasi kapitalis bergabung dengan bentuk-bentuk penindasan yang lain. Misalnya, kaum feminis berargumen bahwa kombinasi kapitalisme dan sexisme menyebabkan biaya reproduksi menjadi rendah. Penjelasannya sederhana, karena kaum wanita yang menjalankan peran dalam keluarga sebagai ibu atau pasangan hidup suaminya dalam sistem ketika kapitalisme dan sexisme berkombinasi akan memaksa mereka baik secara sosial, hukum dan kebudayaan untuk menjalankan pekerjaan domestik tanpa digaji. Dengan kata lain, kaum wanita yang bekerja tanpa digaji inilah yang pada dasarnya telah memberikan subsidi kapital, karena setiap unit pekerjaan yang dibeli oleh pemilik modal dijalan-

kan oleh pekerja dan bukan oleh mesin. Karena itu sejumlah kaum feminis melihat bahwa perampasan dan kontrol atas barang-barang yang dihasilkan oleh kaum wanita dalam pekerjaan domestik—yaitu pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak—merupakan fondasi bagi penindasan terhadap kaum wanita.

Kasus serupa, meskipun tidak setara, bisa dibayangkan terjadi dalam keluarga yang terdiri dari lesbian atau gay: kapital tetap mendapatkan keuntungan dari nilai yang dihasilkan dari pasangan lesbian dan/atau gay, sehingga “pen-genderan atas struktur rumah tangga itu sendiri tidak relevan dalam hubungan kapital dan reproduksi pekerjaan domestik (Smith, 1998: 27).” Dalam konteks kaum gay atau lesbian, mungkin saja ini menjelaskan bahwa relasi penindasan tidak berlaku merata pada semua kaum wanita, karena laki-laki dalam pasangan gay atau lesbian mungkin tidak menerima secara langsung nilai yang dihasilkan dari pekerjaan domestik, perawatan dan pemeliharaan anak. Karena itu, kajian atas kasus-kasus lain yang lebih bersifat empiris menyangkut perbedaan ras dan kelas sosial misalnya perlu terus dilakukan untuk menerangi pengertian mengenai hubungan kapitalisme dan seksisme dengan berbagai kategori sosial non-kelas lainnya.

Aspek lain yang menarik dan relevan adalah dilema yang dapat dikenali antara rekognisi dan redistribusi sebagaimana diperkenalkan oleh Nancy Fraser (tt.). Fraser membedakan dua bentuk ketidakadilan. *Pertama* adalah ketidakadilan sosio-ekonomi yang berakar pada struktur politik-ekonomi masyarakat; contohnya mencakup *eksploitasi* (menggambil keuntungan dari hasil kerja seseorang demi keuntungan yang lain); *marginalisasi ekonomi* (terbelenggu pada pekerjaan yang dibayar rendah atau tak mendapatkan akses pada pekerjaan yang menghasilkan pendapatan sama sekali); dan *deprivasi* (tak mendapatkan standar material hidup yang memadai). *Kedua*, adalah ketidakadilan kultural atau simbolik, yang berakar pada pola-pola representasi, interpretasi dan komunikasi. Ketidakadilan jenis ini bisa berbentuk misalnya, *dominasi kultural* (menjadi sasaran pola-pola interpretasi dan komunikasi yang diasosiasikan dengan kultur lain dan asing dan/atau tidak suka dengan kebudayaan sendiri); *non-rekognisi* (dibuat tersisih atau disisihkan melalui praktek-praktek interpretasi, komunikasi dan perwakilan otoritatif atas kebudayaan sendiri); dan *tak dihormati* (*disrespect*—diperlakukan jahat atau direndahkan secara terus-menerus dalam stereotip representasi kebudayaan publik dan/atau dalam interaksi hidup sehari-hari).

Menurut Fraser, kedua kategori ketidakadilan sosio-ekonomi dan ketidakadilan kultural dan simbolik merupakan perbedaan analitis. Meskipun demikian, keduanya tetap berkaitan dan saling tumpang

tindih dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, norma budaya yang bias secara tak wajar terhadap sejumlah kelompok atau orang pada dasarnya juga terlembaga dalam negara dan ekonomi, sementara ketidakberuntungan ekonomi menghalangi partisipasi yang setara dalam pembentukan budaya, dalam wilayah publik dan kehidupan sehari-hari dan hasilnya “seringkali merupakan lingkaran kejam tentang subordinasi ekonomi dan kultural.”

Dua cara diusulkan oleh Fraser untuk mengatasi atau menyembuhkan ketidakadilan semacam itu. Ketidakadilan sosio-ekonomi diperbaiki dengan restrukturisasi “ekonomi-politik” atau semacamnya yang melibatkan misalnya redistribusi pendapatan, reorganisasi pembagian kerja, memastikan investasi menjadi sasaran pengambilan keputusan demokratis, atau mentransformasi struktur ekonomi dasar yang lain. Dengan singkat, ini dapat disebut sebagai penyembuhan melalui “redistribusi.” Sebaliknya, ketidakadilan kultural dan simbolik membutuhkan penyembuhan dengan semacam perubahan simbolik atau budaya. Misalnya, memberikan penghargaan kembali atau mengangkat penilaian terhadap identitas-identitas yang direndahkan, juga terhadap produk budaya dari kelompok-kelompok yang dijahati/difitnah. Atau memberikan pengakuan dan penghargaan secara positif pada keragaman budaya. Atau yang lebih radikal lagi adalah transformasi keseluruhan atas pola representasi, interpretasi dan komunikasi yang akan mengubah pengertian diri setiap orang. Penyembuhan jenis ini dinamakan sebagai penyembuhan “rekognisi.”

Fraser menawarkan pengertian keadilan yang kompleks, yang tidak terbatas pada “redistribusi ekonomi” seperti teori Marxist klasik tetapi juga pengertian tentang rekognisi, yang menurut Fraser, keduanya dibutuhkan atau harus diperhatikan serentak bagi keadilan (1996). Konsepsi Fraser tentang identitas sejalan dengan pengertian Post-Marxist yang menolak pemahaman esensialistik menyangkut identitas, yaitu menolak pengertian keberadaan sebagai kehadiran (*being as presence*), dan menolak pengertian objektivitas sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri (*being inherent in things themselves*), karena pandangan-pandangan terakhir ini akan gagal memahami bahwa identitas adalah konstruksi sosial, dikonstruksi dalam kaitannya dengan “perbedaan” (*the difference*) dan gagal memahami bahwa objektivitas sosial dibentuk melalui tindakan kekuasaan (*act of power*) (bandingkan dengan Mouffe, 2002: 6).

## E. Kesimpulan

Pelajaran apa yang dapat ditarik dari bentuk-bentuk penundukan dan penindasan yang sebagian akarnya telah diuraikan berasal dari

dimensi moral dan sosio-ekonomi? Pertanyaan ini tetap terbuka, dan penulis tidak bermaksud memberikan jawaban akhir atas pertanyaan ini. Satu hal jelas bahwa dalam radikalisasi demokrasi, beragam kelompok minoritas atau yang lemah, terpinggirkan dan tak berdaya dalam setiap masyarakat, seringkali mengalami nasib paling sial dalam struktur masyarakat itu. Efeknya mereka semua juga tidak beruntung (*worse off*) dari segi ekonomi dan politik. Karena itu semua kelompok minoritas, yang terpinggirkan dan seringkali tertindas dalam semua masyarakat itu, entah kaum wanita, kelompok ras minoritas, etnis, agama-agama minoritas, dan semua kelas sosial ekonomi yang tidak beruntung, kaum LGBT dan sebagainya dapat mendorong konstruksi bentuk-bentuk solidaritas khusus di antara berbagai kelompok perjuangan demokratik yang berbeda ini. Penyatuan kaum pluralist demokratik radikal kemungkinan akan membawa kepada gerakan bersama melalui artikulasi sambil tetap mempertahankan otonominya masing-masing.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Connoly, William, 1995, *Ethos of Pluralization*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Fraser, Nancy, tt., *From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in "a Post-Socialist" Age*.
- \_\_\_\_\_, 1996, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation", *The Tanner Lectures on Human Values*, April 30–May 2, 1996, Stanford University.
- Kapoor, Ilan, 2002, "Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism? The Relevance of The Habermas-Mouffe Debate on the Third World.", *Alternatives: Global, Local, Political*, Vol. 27, No. 4 (Oct.-Dec. 2002), h. 459-487.
- Keyes, Charley, 2011, "End of 'don't ask, don't tell' brings relief Celebration", <http://edition.cnn.com/2011/09/20/us/dadt-end-reaction/>, diunduh 20 September 2011.
- Mouffe, Chantal, 2002, *Politics and Passion: The Stakes of Democracy*, Center for the Study of Democracy, Amsterdam, h. 6.
- \_\_\_\_\_, 2005, *On the Political*, Routledge, New York, h. 5.
- Olson, Joel, 2004, *The Abolition of White Democracy*, University Minnesota Press, Minneapolis and London, h. 107.
- Smith, Anna Marie, 1998, *Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary*, Routledge, London and New York, h. 34.